

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

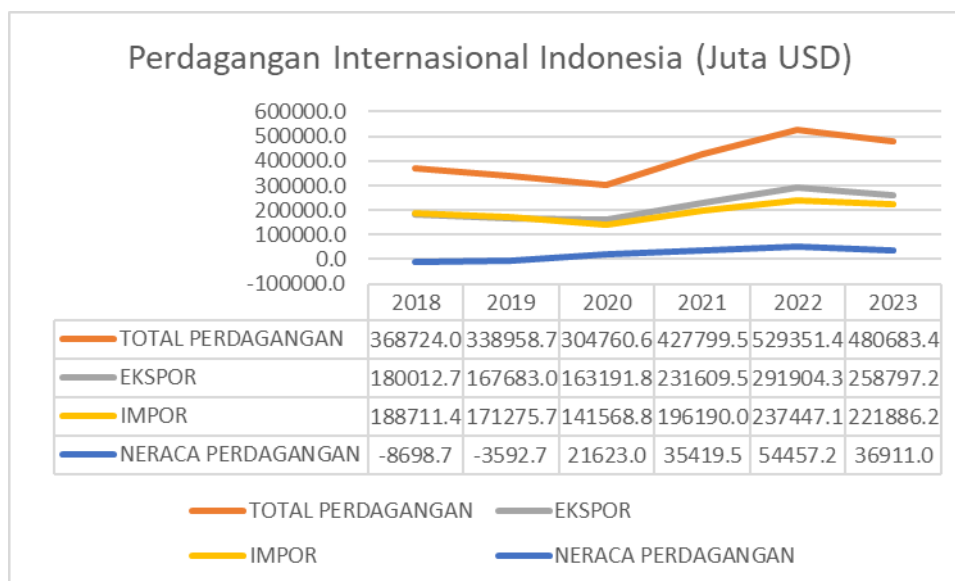
Teori keunggulan komparatif yang dikemukakan David Ricardo beserta teori-teori perdagangan internasional lain yang lebih modern menjelaskan bahwa negara-negara yang menggunakan sistem perdagangan terbuka akan memperoleh efisiensi produksi yang lebih baik dan standar hidup yang lebih tinggi (Mankiw, 2016). Kondisi ini dapat dicapai oleh suatu negara dengan melakukan spesialisasi produksi komoditas yang mampu mereka produksi secara lebih efisien dan dengan biaya kesempatan (*opportunity cost*) yang lebih rendah daripada negara-negara lain. Hal inilah yang mendasari terjadinya perdagangan internasional sehingga suatu negara dapat mengekspor produknya ke negara lain.

Ekspor merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian suatu negara. Model Heckscher-Ohlin menjelaskan bahwa ekspor netto (selisih antara ekspor dan impor) merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional suatu negara (Yuni & Hutabarat, 2021). Masing-masing negara senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja ekspor negaranya melalui berbagai kebijakan, termasuk Indonesia.

Pada kasus Indonesia, berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa ekspor memiliki dampak positif terhadap perekonomian negara diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Astuti & Ayuningtyas (2018), Yuni & Hutabarat (2021) serta Manik (2022). Peningkatan ekspor akan membawa pada peningkatan produksi di dalam negeri. Peningkatan produksi tersebut kemudian akan meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga pada akhirnya terjadi pertumbuhan ekonomi. Selain pertumbuhan ekonomi, ekspor juga memberikan pengaruh positif terhadap cadangan devisa (Jalunggono et al., 2020). Ini dapat terjadi karena transaksi ekspor dibayar menggunakan valuta asing yang menjadi cadangan devisa bagi Indonesia. Ekspor juga terbukti memberikan dampak positif dan signifikan pada penyerapan tenaga kerja di Indonesia (Komariyah et al., 2020). Dengan berbagai peranannya, menarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai ekspor, termasuk hal-hal yang memengaruhinya.

Mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah dan disajikan oleh Kementerian Perdagangan, neraca perdagangan Indonesia cenderung mengalami tren peningkatan dalam enam tahun terakhir. Pada tahun 2018 dan tahun 2019, neraca perdagangan Indonesia berada pada kondisi defisit dimana nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Namun, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, neraca perdagangan Indonesia berbalik mengalami surplus perdagangan. Nilai surplus itu mengalami penambahan dari tahun ke tahun. Perkembangan perdagangan luar negeri Indonesia dapat diamati pada Gambar I.1.

Gambar I. 1. Perdagangan Internasional Indonesia 2018-2023



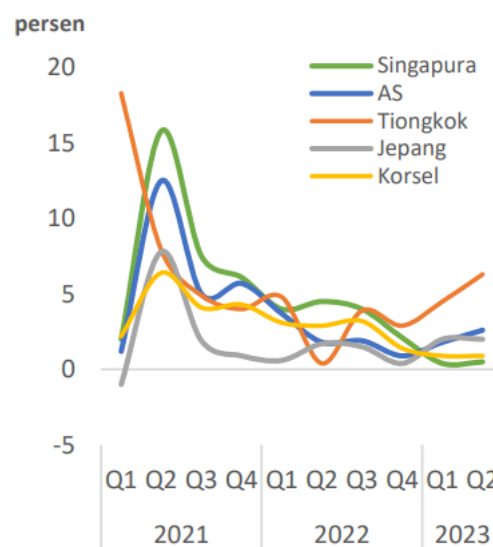
Sumber: Kementerian Perdagangan (2023)

Namun demikian, berbeda dengan tren lima tahun sebelumnya, pada tahun 2023 surplus neraca perdagangan Indonesia mengalami tren penurunan. Total perdagangan, ekspor, impor, serta neraca perdagangan Indonesia tahun 2023 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan nilai pada tahun 2022.

Penurunan transaksi perdagangan internasional ini terjadi sejalan dengan moderasi pada harga komoditas global dan beberapa negara mitra dagang utama yang mengalami perlambatan ekonomi (Badan Kebijakan Fiskal, 2023). Pertumbuhan ekonomi pada beberapa negara tersebut dapat dilihat pada Gambar I.2 dimana hanya Tiongkok yang mengalami peningkatan pertumbuhan di tahun 2023. Penurunan nilai ekspor terjadi seiring dengan terjadinya penurunan harga pada beberapa komoditas ekspor andalan. Sementara penurunan nilai impor didorong oleh penurunan impor barang modal serta bahan baku atau penolong. Hal

berbeda terjadi pada impor barang konsumsi yang tetap mengalami pertumbuhan. Lebih lanjut, Badan Kebijakan Fiskal (2023) menjelaskan bahwa menyikapi kondisi ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan seperti melanjutkan hilirisasi sumber daya alam, diversifikasi mitra dagang hingga memperkuat daya saing produk ekspor.

Gambar I. 2 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara



Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (2023)

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dalam memperkuat daya saing ekspor nasional adalah pemberian fasilitas fiskal. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan perdagangan internasional yang diambil pemerintah. Mulai dari tahun 1980-an, pemerintah mendorong kebijakan promosi ekspor yang salah satunya adalah pemberian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) (Nabila & Sriyanto, 2018). Fasilitas ini diberikan sejalan dengan gagasan untuk mendorong peningkatan ekspor non migas sekaligus mengurangi ketergantungan pada sektor migas. Fasilitas KITE diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC),

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku institusi yang berwenang menangani kepabeanan di Indonesia. Selain fasilitas KITE, terdapat juga fasilitas lain yang bertujuan untuk mendorong ekspor yakni fasilitas Kawasan berikat (KB) (Situmorang, 2020). Terdapat perbedaan mendasar antara kedua jenis fasilitas ini dari sisi pengeluaran barang, yaitu barang dari perusahaan KB dapat diekspor maupun dimasukkan ke dalam negeri. Sementara itu, pengeluaran barang perusahaan KITE tergantung pada jenis fasilitas KITE yang diperoleh.

Fasilitas KITE terbagi atas KITE Pembebasan, KITE Pengembalian dan KITE Industri Kecil dan Menengah (IKM). Perusahaan KITE Pembebasan wajib mengekspor semua barang yang diimpor dengan skema fasilitas tersebut. Lain halnya, dengan perusahaan KITE Pengembalian yang tidak wajib mengekspor barang yang telah diimpor. Hal ini mengacu pada ketentuan mengenai KITE Pembebasan yang saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.04/2022 dan ketentuan terkait KITE Pengembalian yang ditetapkan melalui dengan PMK Nomor 145/PMK.04/2022. Selain kedua jenis tersebut, terdapat juga fasilitas KITE untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dikenal sebagai fasilitas KITE IKM. Sama seperti KITE Pembebasan, dasar hukum yang mengatur mengenai KITE IKM saat ini adalah PMK Nomor 149/PMK.04/2022. Hal ini tidak terlepas dari kesamaan skema pemberian fasilitas dimana terhadap impor yang dilakukan dengan fasilitas ini mendapat pembebasan bea masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Data yang diperoleh dari DJBC menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir, terjadi peningkatan pada jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE, nilai fasilitas yang diberikan, nilai impor, serta nilai eksportnya. Rasio ekspor terhadap impor serta jumlah tenaga kerja yang diserap juga mengalami peningkatan. Data tersebut dapat dilihat dari Tabel I.2.

Tabel I. 1 Data Umum Fasilitas KITE 2022 dan 2023

Data	Tahun	
	2022	2023
Jumlah Perusahaan	446	450
Total Nilai Fasilitas	Rp. 4,04 Triliun	Rp. 5,19 Triliun
Total Nilai Bahan Asal Impor	Rp. 46,67 Triliun	Rp. 56,53 Triliun
Total Nilai Ekspor	Rp. 204,90 Triliun	Rp. 269, 64 Triliun
Kontribusi terhadap Ekspor Nasional	6,20%	6,22%
Rasio Ekspor terhadap Impor	4,39	4,77
Tenaga Kerja	332.210 Orang	347.568 Orang

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2024)

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memberikan bukti empiris bahwa fasilitas KITE memberikan manfaat terhadap kinerja ekspor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas KITE terbukti meningkatkan nilai ekspor perusahaan penerima fasilitas tersebut (Nabila & Sriyanto, 2018). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa fasilitas KITE dapat meningkatkan kinerja ekspor perusahaan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) (Puspitasari & Fachrudin, 2020). Di Korea, ditemukan dampak positif *duty drawback* terhadap promosi ekspor (Mah, 2007b). Kesuksesan fasilitas ini dikarenakan sistem manajemen yang efisien dan tidak dilarang dalam sistem *World Trade Organization* (WTO). Namun penelitian yang dilakukan pada fasilitas *duty drawback* di China yang juga ditujukan untuk promosi

ekspor menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *duty drawback* tidak berpengaruh signifikan terhadap promosi ekspor (Mah, 2007a). Inefisiensi sistem administrasi seperti kecenderungan praktik pelaporan input impor yang berlebihan mungkin menjadi penyebab tidak efisiennya dampak promosi ekspor yang ditimbulkan. Sementara penelitian di Ethiopia menemukan bahwa insentif fiskal untuk tujuan ekspor memiliki korelasi positif dengan nilai maupun volume ekspor (Fanta & Teshale, 2014). Pengaruh positif ini berlaku untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Hassler (2004) melalui penelitiannya menyatakan bahwa pembebasan atau pengembalian pungutan impor yang diberikan melalui fasilitas fiskal dapat memperluas akses perusahaan manufaktur lokal dalam melakukan impor bahan baku dari negara lain. Perusahaan dapat memperoleh baik bahan baku yang lebih murah maupun bahan baku yang pada pasar domestik terbatas. Kemudahan ini kemudian akan membuat produk perusahaan tersebut menjadi lebih kompetitif di pasar ekspor.

Fasilitas KITE merupakan bentuk pemberian insentif atas impor bahan baku dan bahan penolong. Peningkatan impor ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kinerja ekspor perusahaan. Sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa impor bahan baku dan bahan penolong memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja ekspor komoditas pertanian (Lubis, 2010). Namun penelitian lain menunjukkan bahwa semakin besar impor bahan baku dan bahan penolong justru berpengaruh negatif terhadap nilai ekspor yang dicapai (Nabila & Sriyanto, 2018).

Meskipun pemerintah dapat mengupayakan peningkatan ekspor melalui pemberian fasilitas fiskal, terdapat berbagai faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja ekspor pada suatu negara. Yang pertama adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara pada periode waktu tertentu (Mankiw, 2016). Peningkatan PDB pada suatu negara akan terjadi sejalan dengan peningkatan kemampuan negara tersebut dalam memproduksi barang yang dapat diartikan sebagai peningkatan penawaran atas barang tersebut. Peningkatan tersebut akan menambah jumlah barang yang dapat diperdagangkan secara internasional atau dengan kata lain diekspor. Dengan demikian, peningkatan PDB secara teoretis akan meningkatkan nilai ekspor.

Penelitian yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa PDB memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ekspor non migas (Hidayat et al., 2017). Lain halnya dengan hasil penelitian (Septina, 2020) yang menemukan bahwa PDB tidak berpengaruh terhadap ekspor dalam jangka pendek dan baru berpengaruh dalam jangka panjang. Sementara hasil penelitian lain menunjukkan bahwa PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor karet Indonesia ke Amerika Serikat (Fihri et al., 2021).

Faktor lain yang kerap diteliti sehubungan dengan pengaruhnya terhadap kinerja ekspor adalah inflasi. Inflasi dapat didefinisikan sebagai fenomena kenaikan harga secara menyeluruh dalam suatu periode waktu. Inflasi dapat disebabkan oleh bertambahnya permintaan hingga melampaui penawaran atau disebut juga *demand pull inflation* (Okon et al., 2023). Inflasi juga dapat disebabkan oleh peningkatan

biaya dari faktor-faktor produksi yang disebut juga *cost push inflation*. Perbedaan ini berhubungan dengan bervariasinya pengaruh inflasi terhadap nilai ekspor.

Inflasi memengaruhi harga barang domestik secara umum yang kemudian memengaruhi biaya produksi (Puspitasari & Fachrudin, 2020). Penelitian tersebut menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap ekspor industri tekstil di Indonesia. Berlawanan dengan hasil tersebut, penelitian lain menunjukkan bahwa inflasi justru berpengaruh positif terhadap ekspor pada industri pengolahan (Mahendra & Irsad, 2019). Berbeda dengan hasil kedua penelitian sebelumnya, penelitian dari Khoironi & Saskara (2017) yang justru menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap ekspor ikan hias.

Selain faktor-faktor tersebut, nilai tukar juga memiliki peranan penting dalam kondisi perekonomian secara keseluruhan, khususnya dalam perdagangan internasional. *Mundell-Flemming Theory* menjelaskan apabila nilai tukar mata uang suatu negara mengalami penurunan nilai, dapat terjadi peningkatan ekspor negara tersebut (Mankiw, 2016). Kondisi ini diakibatkan harga barang yang menjadi relatif lebih murah dari sudut pandang pembeli dari negara lain. Demikian pula sebaliknya, ketika harga barang ketika nilai tukar mata uang mengalami penguatan, maka harga barang menjadi lebih mahal bagi negara lain dan mengurangi permintaan atas ekspor barang tersebut.

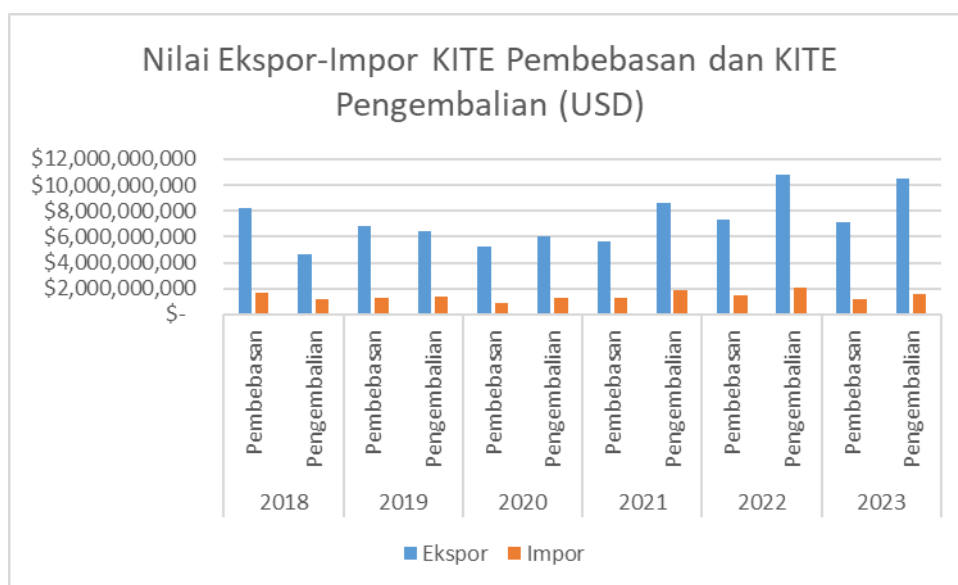
Sesuai dengan Teori Keynes, jika nilai tukar rupiah terdepresiasi, ekspor pada industri tekstil dan produk tekstil yang memperoleh fasilitas KITE akan mengalami peningkatan (Puspitasari & Fachrudin, 2020). Hasil sejalan juga ditunjukkan pada pengaruh nilai tukar terhadap kinerja ekspor perusahaan yang memperoleh fasilitas

KITE secara umum (Nabila & Sriyanto, 2018). Depresiasi nilai tukar juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ekspor di Indonesia, Malaysia dan Singapura (Anshari et al., 2017). Namun penelitian tersebut juga menunjukkan dampak positif depresiasi nilai tukar terhadap ekspor di Filipina. Selain itu, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa nilai tukar tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ekspor Indonesia (Igir et al., 2020).

Penelitian ini berusaha mengisi *research gap* karena keterbatasan beberapa studi terdahulu yang tidak membedakan kategori KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian. Fasilitas KITE Pengembalian dipilih karena mekanismenya yang tidak mewajibkan perusahaan untuk melakukan ekspor atas hasil pengolahan dari barang yang telah diimpor. Hal ini berbeda dengan KITE Pembebasan dan KITE IKM yang mewajibkan ekspor dan memberi sanksi kepada perusahaan yang tidak merealisasikan ekspornya. Di samping itu, perusahaan-perusahaan KITE Pengembalian juga memiliki total nilai transaksi ekspor dan impor yang lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan KITE Pembebasan. Pada periode tahun 2018 sampai tahun 2023, total nilai ekspor perusahaan-perusahaan KITE Pengembalian mencapai USD 47,05 Juta berbanding USD 40,46 Juta dari perusahaan-perusahaan KITE Pembebasan. Demikian juga total nilai impor perusahaan-perusahaan KITE Pengembalian senilai USD 9,40 Juta, sementara perusahaan-perusahaan KITE Pembebasan senilai USD 7,69 Juta. Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar I.3, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, nilai ekspor maupun nilai impor perusahaan-perusahaan KITE Pengembalian selalu lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan KITE Pembebasan. Sebaliknya,

hanya pada tahun 2018 dan 2019 perusahaan-perusahaan KITE Pembebasan mencatatkan nilai transaksi ekspor dan impor yang lebih besar. Atas dasar alasan-alasan tersebut, penelitian tentang pengaruh fasilitas KITE Pengembalian terhadap ekspor dirasa sangat relevan untuk dilakukan.

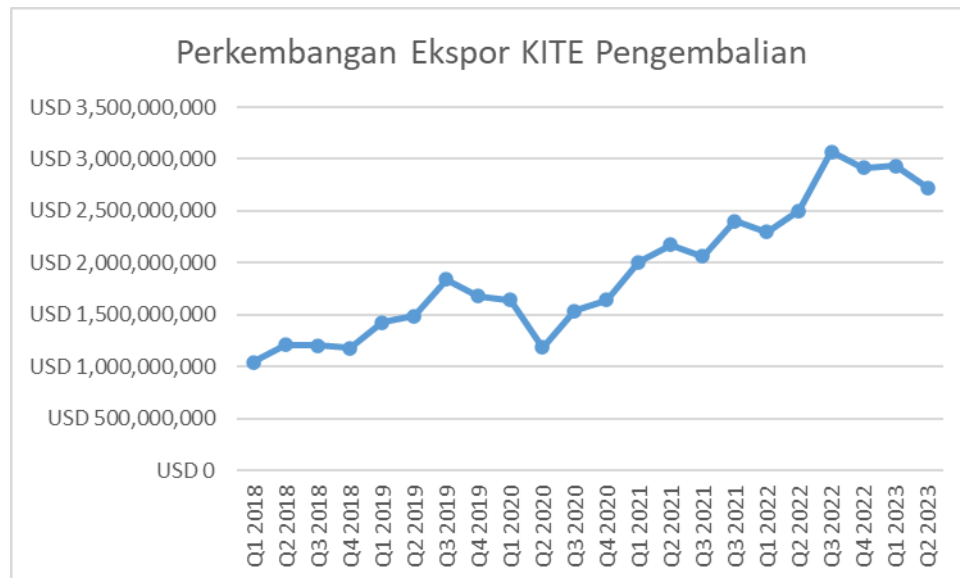
Gambar I.3 Perbandingan Ekspor-Import KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2024)

Sejalan dengan tren perdagangan internasional Indonesia, nilai ekspor yang direalisasikan perusahaan penerima fasilitas KITE Pengembalian secara umum juga mengalami tren peningkatan sebagaimana ditampilkan pada Gambar I.4. Penurunan nilai ekspor yang signifikan terjadi pada tahun 2020, terutama di triwulan kedua. Pada triwulan ketiga tahun 2022 sampai triwulan kedua tahun 2023, ekspor KITE Pengembalian juga mengalami tren penurunan seiring dengan perlambatan ekonomi negara-negara mitra dagang utama.

Gambar I 4 Perkembangan Nilai Ekspor KITE Pengembalian



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2024)

Berdasarkan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh fasilitas KITE, nilai impor, PDB, inflasi, dan nilai tukar terhadap kinerja ekspor, maka penelitian dalam topik ini masih relevan untuk dilakukan. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa penelitian yang telah dilakukan masih terbatas pada perusahaan penerima fasilitas KITE secara umum dan belum membedakan antara KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian (Gumilar et al., 2015; Nabila & Sriyanto, 2018; Puspitasari & Fachrudin, 2020). Penelitian yang membedakan kedua jenis fasilitas KITE diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang efektivitas dari masing-masing jenis, sehingga kemudian dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik. Fasilitas KITE Pengembalian memiliki mekanisme yang tidak mewajibkan perusahaan untuk melakukan ekspor atas barang yang telah diimpor sehingga lebih relevan untuk

diteliti manfaatnya dalam meningkatkan ekspor. Dari sisi volume perdagangan, perusahaan-perusahaan pengguna fasilitas KITE Pengembalian juga memiliki nilai ekspor dan nilai impor yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan pengguna KITE Pembebasan. Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini akan menguji pengaruh fasilitas KITE Pengembalian, nilai impor, PDB, inflasi dan nilai tukar terhadap nilai ekspor.

Jenis fasilitas KITE Pengembalian ini serupa dengan skema *duty drawbacks* yang banyak diterapkan di negara-negara lain seperti China, Korea, Ethiopia dan berbagai negara lain (Fanta & Teshale, 2014; Mah, 2007a, 2007b). Penelitian di Afrika Timur menunjukkan bahwa *duty drawbacks* merupakan fasilitas dengan tujuan promosi ekspor yang paling efektif dalam meningkatkan volume ekspor (Ongeri & Ongeri, 2017). Berdasarkan penjelasan sebagaimana di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Analisis Pengaruh Fasilitas KITE, Nilai Impor, PDB, Inflasi, dan Nilai Tukar terhadap Kinerja Ekspor”.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan ruang lingkup yang terbatas pada perusahaan-perusahaan yang memperoleh fasilitas KITE Pengembalian di Indonesia. Periode waktu yang digunakan adalah triwulan pertama tahun 2018 hingga triwulan kedua tahun 2023. Penggunaan periode ini didasari tren penurunan ekspor pada awal tahun 2023 dan mempertimbangkan ketersediaan data penelitian. Variabel dependen yang digunakan adalah nilai ekspor perusahaan penerima fasilitas KITE

Pengembalian. Variabel-variabel independen yang digunakan adalah fasilitas KITE Pengembalian, nilai impor, PDB, inflasi dan nilai tukar mata uang.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang pada penelitian ini antara lain:

1. Apakah fasilitas KITE Pengembalian berpengaruh terhadap ekspor perusahaan KITE Pengembalian?
2. Apakah nilai impor berpengaruh terhadap ekspor perusahaan KITE Pengembalian?
3. Apakah PDB berpengaruh terhadap ekspor perusahaan KITE Pengembalian?
4. Apakah inflasi berpengaruh terhadap ekspor perusahaan KITE Pengembalian?
5. Apakah nilai tukar berpengaruh terhadap ekspor perusahaan KITE Pengembalian?

1.4 Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh fasilitas KITE Pengembalian terhadap ekspor perusahaan KITE Pengembalian.
2. Menganalisis pengaruh nilai impor bahan baku dan bahan penolong terhadap ekspor perusahaan KITE Pengembalian.
3. Menganalisis pengaruh PDB terhadap ekspor perusahaan KITE Pengembalian.

4. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap ekspor perusahaan KITE Pengembalian.
5. Menganalisis pengaruh nilai tukar terhadap ekspor perusahaan KITE Pengembalian.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan dan menambah perspektif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja ekspor perusahaan penerima fasilitas KITE dari sisi akademis. Sementara dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat:

1. Menjadi tambahan pertimbangan bagi Kementerian Keuangan khususnya DJBC dalam menyusun kebijakan terkait fasilitas fiskal, terutama fasilitas KITE Pengembalian.
2. Menjadi tambahan pertimbangan bagi instansi maupun otoritas lain yang kewenangannya berhubungan dengan aspek-aspek ekonomi makro yang dibahas dalam penelitian ini.
3. Memberikan tambahan informasi bagi perusahaan mengenai manfaat penggunaan fasilitas KITE Pengembalian.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini membahas mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, ruang lingkup yang membatasi penelitian, rumusan

masalah yang ingin dijawab melalui penelitian ini, tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri atas sumber kepustakaan yang diacu, digunakan, dikutip, serta dijadikan landasan teori dalam melaksanakan penelitian ini. Setelah itu akan diuraikan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang kemudian disintesis. Bab ini juga memuat kerangka pemikiran penelitian serta hipotesis yang digunakan sebagai dugaan sementara atas penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas gambaran umum tentang objek penelitian, jenis data beserta cara memperolehnya, variabel yang digunakan, definisi operasional variabel tersebut proksinya, model penelitian yang digunakan, serta metode pengujian hipotesis, sarana yang digunakan serta hasil yang diharapkan atas penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan hasil dari pemilihan sampel, pengujian-pengujian statistik yang dilakukan hingga interpretasi hasil pengujian dan pembahasan atas hasil penelitian tersebut.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini memuat simpulan dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dilakukan. Kemudian dijelaskan pula saran dan keterbatasan dari penelitian ini.